

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), adalah Dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode satu Tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja SKPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dari Visi, Misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan dan mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Penyusunan Renja SKPD berpedoman pada PERMENDAGRI 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

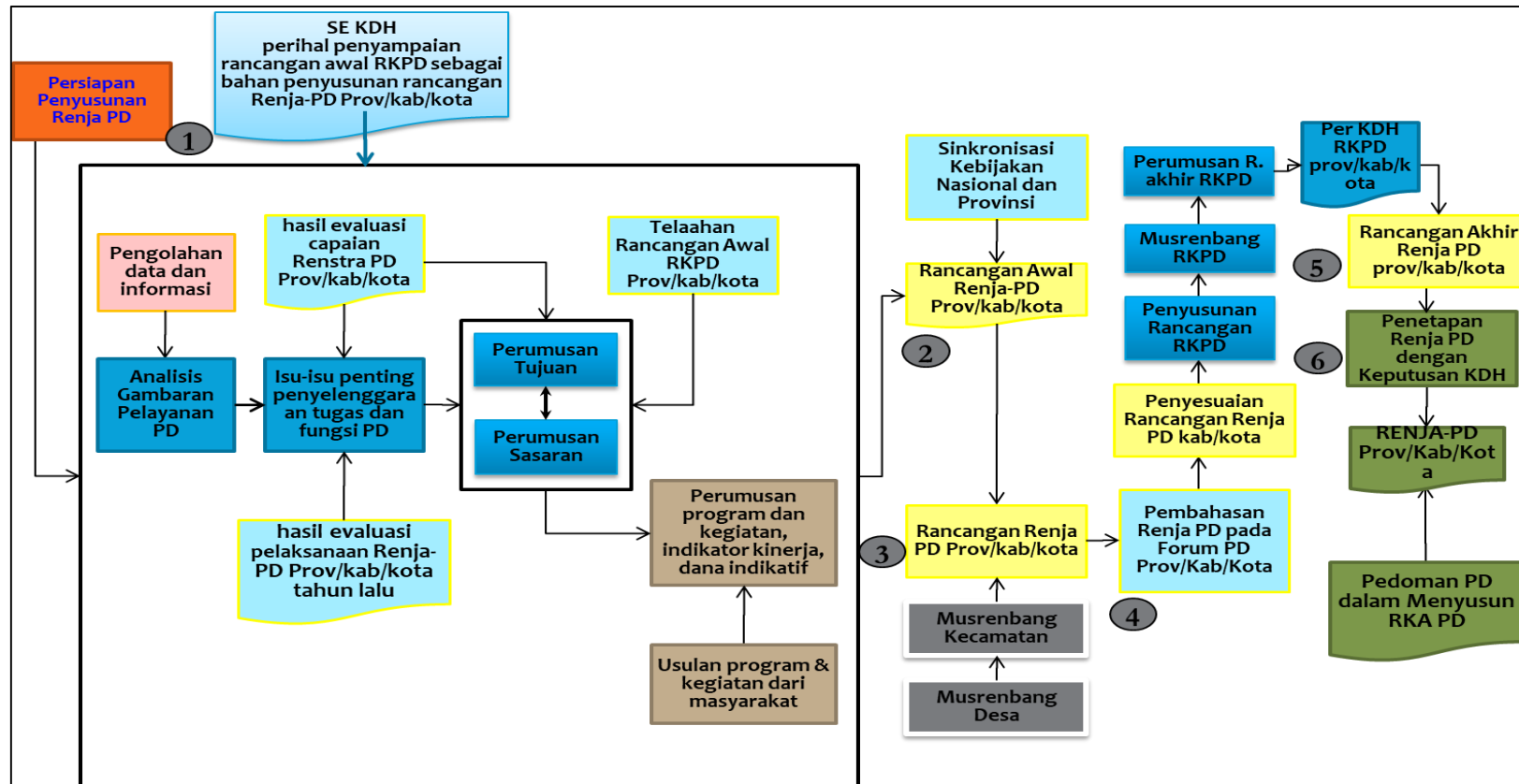
Persyaratan Penyusunan RAPBD melalui tahap sebagai berikut :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan

2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrebang
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (Outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alur Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah :

Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 104, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4421)
4. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-

- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019 -2024;
26. Peraturan Bupati Sampang Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024;
27. Peraturan Bupati Sampang Nomor 38 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang adalah acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang Tahun 2021.

Adapun tujuan Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang Tahun 2021.

1. Tersedianya dokumen penjabaran Renstra Bakesbang dan Politik Tahun 2019-2024 dan RKPd Kabupaten Sampang Tahun 2020;
2. Tersedianya dokumen acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021;
3. Tersedianya dokumen yang digunakan sebagai instrument pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang Tahun 2021 sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1).

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- a. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang meliputi Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung beserta Program dan Keegiatannya.

BAB V. PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 dimaksudkan untuk menilai sekaligus menganalisa pelaksanaan progra maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang. Evaluasi meliputi evaluasi kinerja Rencana Kerja Tahun 2019 dan Renstra Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang Tahun 2019 – 2024. Dari evaluasi ini dapat diketahui secara langsung capaian kinerja program dan kegiatan sampai dengan tahun kelima pelaksanaan Renstra 2019 – 2024. Dengan demikian dapat dilihat faktor-faktor pendorong keberhasilan dan faktor kendala yang terjadi selama melaksanakan program dan kegiatan yang telah tersusun dalam Rencana Starategis Badan Kesatuan Bangsa dan Polittk Kabupaten Sampang.

Evaluasi Pelaksanaan dan Pencapaian Kinerja Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019.

Tabel 2.1
Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Tahun 2019 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang

NO	URAIAN	ALOKASI BIAYA			URAIAN	OUTPUT KELUARAN		
		TARGET	REALISASI	%		TARGET	REALISASI	%
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL)	2.350.492.063	1.852.101.118	78,80	Gaji pegawai	14 Bulan	14 Bulan	100
B	BELANJA LANGSUNG (BL)	2.996.935.669	2.053.114.672	68,51				
1	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	353.029.500	250.893.091	71,07	Prosentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi dan Jasa Perkantoran	100 %	66,59 %	66,59
	1 Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	152.282.000	111.702.937	73,35	Jumlah Surat Terkirim	1200 Surat	1214 Surat	101,17
					Jumlah pembayaran Rekening Langganan Telepon, Air dan Listrik	3 Unit	3 Unit	100
					Perpanjangan ijin STNK	31 Roda 2 3 Roda 4	30 Roda 2 3 Roda 4	96,77 100
					Alat dan Bahan Kebersihan	23 Jenis	23 Jenis	100

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2	Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	82.347.500	67.216.604	81,63	Jumlah alat Tulis kantor	34	Jenis	34	Jenis	100
					Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan	10	Jenis	9	Jenis	100
					Jumlah Komponen Instalasi listrik / Penerangan Bangunan kantor	30000	Lembar	19490	Lembar	64,97
					Jumlah Surat Kabar	6	Jenis	6	Jenis	100
					Jumlah makanan dan Minuman untuk rapat staf dan tamu	2	Jenis	2	Jenis	100
					660	Dos	465	Dos	70,45	
3	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	118.400.000	71.973.550	60,79	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam dan luar daerah	67	Kali	57	Kali	85,07
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	236.802.169	223.546.775	94,40	Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam keadaan baik	100	%	96,70	%	96,70
1	Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	236.802.169	223.546.775	94,40	Jumlah perlengkapan gedung kantor	3	Jenis	3	Jenis	100
					Jumlah Meubelair yang tersedia	4	Jenis	4	Jenis	100
					Jumlah Komputer yang tersedia	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100
					Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	4	Jenis	4	Jenis	100
					Gedung kantor aparatur pemerintah daerah yang terpelihara secara rutin	3	Kegiatan	3	Kegiatan	100
					Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	3	Jenis	3	Jenis	100
					Jumlah meubelair yang terpelihara secara rutin / berkala	9	Jenis	9	Jenis	100
					Pemeliharaan rutin / berkala peralatan & perlengkapan kantor	64	Buah	61	Buah	95,31
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	17.250.000	10.785.000	62,52	Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	%	75	%	75
1	Pelaksanaan Bimtek / Sosialisasi / Seminar	17.250.000	10.785.000	62,52	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek	4	PNS	3	PNS	75
4	Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik	42.465.000	41.350.000	97,37	Prosentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik	100	%	100	%	100
1	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	13.785.000	13.395.000	97,17	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	1	Laporan	100
					Laporan Keuangan Semester	1	Laporan	1	Laporan	100
					Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	Laporan	1	Laporan	100
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Per	13.680.000	13.030.000	95,25	Renja, RKA-SKPD dan DPA-SKPD	3	Laporan	3	Laporan	100
3	Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	15.000.000	14.925.000	99,50	Jumlah Promosi Pelayanan Perangkat Daerah	2	Laporan	2	Laporan	100
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Dini	911.332.000	685.246.610	75,19	Persentase penurunan kejadian terkait konflik sosial	100	%	90,00	%	90,00
1	Cegah Dini Permasalahan Sosial	792.651.000	627.839.150	79,21	Jumlah Peserta Sosialisasi BNK	1400	Peserta	1400	Peserta	100
					Jumlah Rakor TIM BNK	12	Kali	12	Kali	100
					Jumlah Peserta Kaderisasi	300	Peserta	300	Peserta	100
					Jumlah Rakor Tim Kewaspadaan Dini	12	Kali	12	Kali	100
2	Deteksi Dini Permasalahan Sosial	118.681.000	57.407.460	48,37	Jumlah Rakor TIM FKDM	12	Kali	12	Kali	100
6	Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi	760.973.500	411.422.896	54,07	Persentase lembaga demokrasi yang dilegalisasi	100	%	100	%	100
1	Pemberdayaan dan peningkatan kinerja parpol, keormasan dan LSM	280.390.000	105.124.457	37,49	Jumlah Peserta sosialisasi dan pembinaan serta pemberdayaan	200	Peserta	200	Peserta	100
2	Optimalisasi Pemantauan dan Perkembangan Politik Pileg & Pilpres	480.583.500	306.298.439	63,73	Bantuan Keuangan Partai Politik	11	Parpol	11	Parpol	100
					Jumlah Diskusi Politik	2	Kali	2	Kali	100

7	<i>Program Pengembangan Etika dan Budaya Politik</i>	178.494.000	138.450.800	77,57	<i>Persentase masyarakat yang mendapatkan pemahaman etika dan budaya politik</i>	0,03	%	0,03	%	100,00
1	Pemantapan dan Pengembangan Etika Politik	134.046.000	119.602.800	89,23	Jumlah masy. yang mengikuti kegiatan Pemantapan Etika Politik	186	Peserta	186	Peserta	100
2	Koordinasi Penegakan HAM	44.448.000	18.848.000	42,40	Jumlah Rakor Tim & Laporan RAN HAM	8	Kali	1	Kali	12,50
8	<i>Program Integrasi Kebangsaan</i>	496.589.500	291.419.500	58,68	<i>Jumlah Kelompok yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan</i>	2	<i>Kelompok</i>	2	<i>Kelompok</i>	100
1	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	232.365.000	178.905.000	76,99	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan	250	Peserta	200	Peserta	80
2	Pemantapan Pembauran Kebangsaan	264.224.500	112.514.500	42,58	Jumlah Rakor Tim FKUB	12	Kali	11	Kali	91,67
					Jumlah Fasilitasi Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kab/Kota	10	Kali	0	Kali	0
					Pakem	10	Kali	1	Kali	10
	JUMLAH (BL + BTL)	5.347.427.732	3.905.215.790	73,03						

Rata-rata realisasi kinerja program/kegiatan adalah 73,03% atau dapat dikategorikan baik.

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Renstra Bakesbang dan Politik sampai dengan Tahun 2019 dilaksanakan dalam rangka mendukung capaian sasaran RPJMD 2019-2024 yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut terealisasi sampai dengan tahun anggaran berjalan. Dalam Renstra Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 memuat 8 program dan 16 kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun.

Adapun rekapitulasi pelaksanaan Renstra Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bakesbang dan Politik dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah/d.Tahun2019

KODE REKENING	Urusan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Prog./Keg. Renstra 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran s/d. Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2019			Realisasi Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 Smt.I)	Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2019	
					Target Renja Perangkat Daerah 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. S/d Tahun Berjalan (Tahun 2020 Smt. I)	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
4 05 06 32	Program Peningkatan Kewaspadaan Dini	Persentase penurunan kejadian terkait konflik sosial	100		100	100	100		100	90
4. 05 06 .32 .01	1 Cegah Dini Permasalahan Sosial	- Jumlah Peserta Sosialisasi BNK	8400		1400 Peserta	1400 Peserta	100		1400	16,67
		- Jumlah Rakor TIM BNK	72		12 Kali	12 Kali	100	5	17	23,61
		- Jumlah Peserta Kaderisasi	1800		300 Peserta	300 Peserta	100	150	450	25,00
		- Jumlah Rakor Tim Kewaspadaan Dini	72		12 Kali	12 Kali	100	5	17	23,61
4. 05 06 .32 .02	2 Deteksi Dini Permasalahan Sosial	- Jumlah Rakor TIM FKDM	72		12 Kali	12 Kali	100	5	17	23,61
4 05 06 33	Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi	Persentase lembaga demokrasi yang dilegalisasi	100		100	100	100		100	100
4. 05 06 33. .01	1 Pemberdayaan dan Peningkatan Kinerja Parpol, Keormasan dan LSM	- Jumlah Peserta sosialisasi dan pembinaan serta pemberdayaan	3600		200 Peserta	200 Peserta	100	100	300	8,33
4. 05 06 33. .02	2 Optimalisasi Pemantauan dan Perkembangan Politik Pileg dan Pilpres	- Bantuan Keuangan Partai Politik	11		11 Parpol	11 Parpol	100		11	100,00
		- Jumlah Diskusi Politik	14		2 Kali	2 Kali	100	1	3	21,43
4 05 06 34	Program Pengembangan Etika dan Budaya politik	Persentase masyarakat yang mendapatkan pemahaman etika dan budaya politik	0,18		0,03	0,03	0,03		0,03	100
4. 05 06 34. 01	1 Pemantapan dan Pengembangan Etika Politik	- Jumlah masy. yang mengikuti kegiatan Pemantapan Etika Politik	1116		186 Peserta	186 Peserta	100	186	372	33,33
4. 05 06 34. .02	2 Koordinasi Penegakan HAM	- Jumlah Rakor Tim & Laporan RAN HAM	40		8 Kali	1 Kali	12,5		1	2,50
4 05 06 35	Program Integrasi Kebangsaan	Jumlah Kelompok yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	2 Kelompok		2 Kelompo	2 Kelompok	100		2	0,03
4. 05 06 35. .01	1 Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan	1200		250 Peserta	200 Peserta	80		200	16,67
4. 05 06 35. .02	2 Pemantapan Pembauran Kebangsaan	- Jumlah Rakor Tim FKUB	72		12 Kali	11 Kali	91,67	6	17	23,61
		- Jumlah Fasilitasi Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kab/Kota	72		10 Kali	Kali	0		0	0,00
		- Pakem	10		10 Kali	1 Kali	10		1	10,00

4. .05 .06 .01	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Prosentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi dan Jasa Perkantoran	100		100	66,59	66,59		66,59	66,59
4. 05 06 01. 01	1 Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	- Jumlah Surat Terkirim	7200		1200 Surat	1214 Surat	101,17	179	1393	19,35
		- Jumlah pembayaran Rekening Langganan Telepon, Air dan Listrik	3		3 Unit	3 Unit	100	3	6	200,00
		- Perpanjangan ijin STNK	31		31 Roda 2	30 Roda 2	96,77	17	47	151,61
			3		3 Roda 4	3 Roda 4	100	0	3	100,00
		- Alat dan Bahan Kebersihan	2640		23 Jenis	23 Jenis	100	23	46	
4. 05 06 01. 02	2 Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	- Jumlah alat Tulis kantor	204		34 Jenis	34 Jenis	100	34	68	33,33
		- Jumlah Barang Cetak dan	60		10 Jenis	9 Jenis	100	9	18	30,00
		- Penggandaan	180000		30000 Lembar	19490 Lembar	64,97	14750	34240	19,02
		- Jumlah Komponen Instalasi listrik / Penerangan Bangunan kantor	42		6 Jenis	6 Jenis	100	4	10	23,81
		- Jumlah Surat Kabar	2		2 Jenis	2 Jenis	100	2	4	200,00
		- Jumlah makanan dan Minuman untuk rapat staf dan tamu	660		660 Dos	465 Dos	70,45	82	547	82,88
4. 05 06 01. 03	3 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	- Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah dan Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	3300		67 Kali	57 Kali	85,07	12	69	2,09
4. .05 .06 .02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana apratur dalam keadaan baik	100		100	96,70	96,70		96,7	96,70
4. 05 06 02. 01	Pembangunan / Rehab / Pemeliharaan Gedung Kantor	- Gedung Kantor Aparatur pemerintah Daerah yang terpelihara secara rutin	3		3 Kegiatan	3 Kegiatan	100		3	100,00
4. 05 06 02. 03	Pengadaan / Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	- Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 yan di pelihara	3		3 Jenis	3 Jenis	100		3	100,00
4. 05 06 02. 04	Pengadaan / Pemeliharaan peralatan dan perlenkapan kantor	- Jumlah perlengkapan gedung kantor	3		3 Jenis	3 Jenis	100	0	3	100,00
		- Jumlah Meubelair yang tersedia	4		4 Jenis	4 Jenis	100	2	6	150,00
		- Jumlah Komputer yang tersedia	1		1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	0	1	100,00
		- Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	4		4 Jenis	4 Jenis	100	1	5	125,00
		- Jumlah meubelair yang terpelihara secara rutin / berkala	9		9 Jenis	9 Jenis	100	2	11	122,22
		- Pemeliharaan rutin / berkala peralatan & perlengkapan kantor	9		9 Jenis	8 Jenis	95,31	7	15	166,67

4. .05 .06 .03	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100		100	75	75		75	75
4. 05 06 03. 01	Pelaksanaan Bintek / Sosial / Seminar	- Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek	24		4 ASN	3 ASN	75		3	12,50
4 05 06 04	Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik	Prosentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik	100		100	100	100		100	100
4. 05 06 04. 01	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	- Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6		1 Laporan	1 Laporan	100	1	2	33,33
		- Laporan Keuangan Semesteran	6		1 Laporan	1 Laporan	100	1	2	33,33
		- Laporan Keuangan Akhir Tahun	6		1 Laporan	1 Laporan	100		1	16,67
4. 05 06 04. 02	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	- Renja, RKA-SKPD dan DPA-SKPD	18		3 Laporan	3 Laporan	100		3	16,67
4. 05 06 04. 03	Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	- Jumlah Promosi Pelayanan Perangkat Daerah	12		2 Laporan	2 Laporan	100		2	16,67

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bakesbang & Politik Kabupaten Sampang

Analisis kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik meliputi urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, berdasarkan Revisi RPJMD Kabupaten Sampang 2019-2020, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang berperan melaksanakan Misi 5 : Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dengan capaian program dan kegiatan sebagaimana target & realisasi indikator sasaran seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra SKPD 2019 - 2024				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisa
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
1	Persentase penurunan potensi konflik	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Sampang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang dalam mengemban tugas, pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi lingkungan yang bersifat strategis yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa yang menjadi isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Isu-isu Penting tersebut dapat berupa Informasi-informasi, kejadian-kejadian, fenomena-fenomena terkini yang memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi demikian pula halnya dengan faktor-faktor internal maupun eksternal yang eksistensinya mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja organisasi.

Isu permasalahan strategis yang dapat diambil dengan memperhatikan situasi kondisi yang berkembang saat ini antara lain:

1. Masyarakat yang rentan terhadap isu – isu negatif,
2. Kurang optimalnya penguatan karakter bangsa dan empat konsensus nasional,
3. Belum maksimalnya partisipasi politik masyarakat,
4. Masih maraknya penyalahgunaan Narkotika.
5. Masih terjadinya fluktuasi partisipasi politik;
6. Kurangnya tingkat kepedulian / sikap apatis masyarakat

Lemahnya jaringan koordinasi antara aparat dan instansi/lembaga pemantau di lapangan, serta belum adanya aplikasi pelaporan terpadu

Dalam menganalisis dan menyikapi pengaruh lingkungan tersebut dapat digunakan analisis SWOT yaitu (strengths, weaknesses, opportunities, treaths). Dengan penjelasan bahwa lingkungan internal organisasi terdiri dari dua faktor strategis yaitu kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) organisasi, sedangkan lingkungan eksternal organisasi yaitu peluang (opportunities) dan ancaman/tantangan (treaths). Analisis tersebut digunakan Badan Kesatua Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang dalam mengatasi kelemahan dan menanggulangi ancaman serta untuk memperkuat, meningkatkan dan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dengan identifikasi sbb :

Lingkungan Internal

- Kekuatan (Strengths) :
 1. Peraturan Peraturan Bupati Sampang No. 58 Tahun 2008 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupten Sampang mempunyai tugas pokok : “ Membantu Bupati Dalam Melaksanakan Urusan Rumah Tangga Daerah dan Tugas Pembantuan, Serta Melakukan Pembinaan, Koordinasi, Pengawasan, dan Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri “

2. Penyediaan anggaran kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jatim; Adanya akses yang baik kepada Infra struktur politik dan supra struktur politik;
 3. Tersedianya Sumber Daya Manusia;
 4. Adanya bentuk jejaring sebagai wadah koordinasi lintas sektoral.
- Kelemahan (Weaknesses) :
1. Kompetensi Sumber daya Aparatur yang belum optimal;
 2. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia;
 3. Peran Bakesbangpol secara mendasar belum menyentuh masyarakat sehingga Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang kurang dikenal masyarakat;
 4. Job discription yang kurang tepat dan kurang jelas yang sering kali overlapping (tumpang tindih) dengan Badan/Dinas lain.

Lingkungan Eksternal

- Peluang (opportunities) :
1. Masih adanya kebutuhan masyarakat terhadap peran Pemerintah dalam pemberdayaan infra struktur politik dan supra struktur politik, wawasan kebangsaan, Demokrasi dan HAM.
 2. Partisipasi Parpol, Ormas, LSM dan Perguruan Tinggi dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan demokrasi.
- Ancaman (treaths) :
1. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD;
 2. Keraguan masyarakat terhadap netralitas seorang PNS;
 3. Relatif tingginya potensi konflik dimasyarakat (horizontal, vertikal dan SARA).

Strategi

Dengan memperhatikan lingkungan strategi yang ada, strategi yang ingin dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang ditetapkan sebagai berikut :

1. Memberdayakan kebhinekaan Indonesia dan peningkatan pemahaman Etika berbangsa dan Bernegara.
2. Memelihara dan menghormati komunitas kehidupan politik yang berorientasi pada pengembangan masyarakat madani yang dicita-citakan.
3. Memelihara kewaspadaan nasional agar terhindar dari upaya pemecahbelahan bangsa (disintegrasi bangsa) melalui gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban Peningkatan pemahaman HAM di jajaran aparaturnya pemerintah dan masyarakat
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban.
5. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui pendidikan politik yang berkesinambungan.
6. Mengembangkan kreatifitas masyarakat dengan memberikan dorongan kearah kehidupan politik yang menghormati HAM, berkeadilan, bertanggungjawab dan mampu berkompetisi secara sehat dan dinamis.
7. Meningkatkan kerja sama lintas sektoral dalam mewujudkan stabilitas politik di Kabupaten Sampang
8. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat serta partai politik tentang peraturan perundangan yang berkaitan dengan pemilu dan partai politik

Strategi di atas, merupakan acuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, merumuskan cara pencapaiannya yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Sampang tahun 2021 dilakukan melalui proses membandingkan antara usulan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021 dengan kebutuhan riil Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang pada tahun tersebut.

Hal ini dilakukan dalam rangka mengakomodir usulan-usulan perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah yang dikompilasikan dengan kebutuhan riil dengan tujuan menetapkan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021 yang merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan Tupoksi Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang. Review tersebut di gambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Kabupaten Sampang

RANCANGAN AWAL						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET		Pagu Indikatif	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET		Pagu Indikatif
1 Program Peningkatan Kewaspadaan Sosial	Bakesbangpol	Persentase penurunan kejadian	%	100%	1.002.198.760	1 Program Peningkatan Kewaspadaan Sosial	Bakesbangpol	Persentase penurunan kejadian	%	100%	1.043.000.000
1 Cegah Dini Permasalahan Sosial		- Jumlah Peserta Sosialisasi BNK	Peserta	1400	785.229.260	1 Cegah Dini Permasalahan Sosial		- Jumlah Peserta Sosialisasi BNK	Peserta	1400	643.000.000
		- Jumlah Rakor TIM BNK	Kali	12				- Jumlah Rakor TIM BNK	Kali	12	
		- Jumlah Peserta Kaderisasi	Orang	300				- Jumlah Peserta Kaderisasi	Orang	300	
		- Jumlah Rakor Tim Kewaspadaan Dini	Kali	12				- Jumlah Rakor Tim Kewaspadaan Dini	Kali	12	
2 Deteksi Dini Permasalahan Sosial	Bakesbangpol	- Jumlah Rakor TIM FKDM	Kali	12	216.969.500	2 Deteksi Dini Permasalahan Sosial	Bakesbangpol	- Jumlah Rakor TIM FKDM	Kali	12	400.000.000
2 Program Pemantapan dan Penguatan	Bakesbangpol	Prosentase Lembaga Demokrasi	%	100%	591.776.350	2 Program Pemantapan dan	Bakesbangpol	Prosentase Lembaga Demokrasi	%	100%	450.000.000
1 Pemberdayaan dan Peningkatan Kinerja Parpol, Keormasan dan LSM		- Jumlah Peserta sosialisasi dan pembinaan serta pemberdayaan	Peserta	600	335.282.200	1 Pemberdayaan dan Peningkatan Kinerja Parpol, Keormasan dan LSM		- Jumlah Peserta sosialisasi dan pembinaan serta pemberdayaan	Peserta	600	250.000.000
2 Optimalisasi Pemantauan dan Perkembangan Politik Pileg dan Pilpres	Bakesbangpol	- Bantuan Keuangan Partai Politik	Parpol	11	256.494.150	2 Optimalisasi Pemantauan dan Perkembangan Politik Pileg dan Pilpres	Bakesbangpol	- Bantuan Keuangan Partai Politik	Parpol	11	200.000.000
		- Jumlah Diskusi Politik	Kali	2				- Jumlah Diskusi Politik	Kali	2	
3 Program Pengembangan Etika dan	Bakesbangpol	Persentase masyarakat yang	%	0,09	242.667.700	3 Program Pengembangan Etika dan	Bakesbangpol	Persentase masyarakat yang	%	0,09	190.000.000
1 Pemantapan dan Pengembangan Etika Politik		- Jumlah masy. yang mengikuti kegiatan Pemantapan Etika Politik	Peserta	186	192.724.400	1 Pemantapan dan Pengembangan Etika Politik		- Jumlah masy. yang mengikuti kegiatan Pemantapan Etika Politik	Peserta	186	150.000.000
2 Koordinasi Penegakan HAM	Bakesbangpol	- Jumlah Rakor Tim & Laporan RAN HAM	Kali	8	49.943.300	2 Koordinasi Penegakan HAM	Bakesbangpol	- Jumlah Rakor Tim & Laporan RAN HAM	Kali	8	40.000.000
4 Program Integrasi Kebangsaan	Bakesbangpol	Jumlah Kelompok yang	Kelompok	2	865.000.000	4 Program Integrasi Kebangsaan	Bakesbangpol	Jumlah Kelompok yang	Kelompok	2	650.000.000
1 Pengembangan Wawasan Kebangsaan		- Jumlah Pelaksanaan Upacara Bela Negara	Kegiatan	1	413.974.000	1 Pengembangan Wawasan Kebangsaan		- Jumlah Pelaksanaan Upacara Bela Negara	Kegiatan	1	300.000.000
		- Lomba Pancasila	Kegiatan	1				- Lomba Pancasila	Kegiatan	1	
		- Jumlah Peserta yang Mengikuti Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan	Peserta Sosialisasi	200				- Jumlah Peserta yang Mengikuti Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan	Peserta Sosialisasi	200	
2 Pemantapan Pembauran Kebangsaan	Bakesbangpol	- Jumlah Rakor Tim FKUB	Kali	12	451.026.000	2 Pemantapan Pembauran Kebangsaan	Bakesbangpol	- Jumlah Rakor Tim FKUB	Kali	12	350.000.000
		- Jumlah Fasilitas Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kab/Kota	Kali	12				- Jumlah Fasilitas Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kab/Kota	Kali	12	

RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET		Pagu Indikatif	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET		Pagu Indikatif
5 Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran		Prosentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi dan Jasa Perkantoran	%	100%	341.998.225	5 Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran		Prosentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi dan Jasa Perkantoran	%	100%	350.000.000
1 Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Bakesbangpol	Jumlah Surat Terkirim	Lbr	1200	160.432.400	1 Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Bakesbangpol	Jumlah Surat Terkirim	Lbr	1200	200.000.000
		Jumlah pembayaran Rekening Langganan Telepon, Air dan Listrik	Unit	3				Jumlah pembayaran Rekening Langganan Telepon, Air dan Listrik	Unit	3	
		Perpanjangan ijin STNK	Roda 2	31				Perpanjangan ijin STNK	Roda 2	31	
			Roda 4	3					Roda 4	3	
		- Jumlah makanan dan Minuman untuk rapat staf dan tamu	Dos	660			- Jumlah makanan dan Minuman untuk rapat staf dan tamu	Dos	660		
2 Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	Bakesbangpol	Alat dan Bahan Kebersihan	Jenis		130.479.065	2 Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	Bakesbangpol	Alat dan Bahan Kebersihan	Jenis		100.000.000
		- Jumlah alat Tulis kantor	Jenis	34				- Jumlah alat Tulis kantor	Jenis	34	
		- Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis	10				- Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis	10	
			Lembar	30000					Lembar	30000	
		- Jumlah Komponen Instalasi listrik / Penerangan Bangunan kantor	Jenis	7				- Jumlah Komponen Instalasi listrik / Penerangan Bangunan kantor	Jenis	7	
- Jumlah Surat Kabar	Jenis	2	- Jumlah Surat Kabar	Jenis	2						
		- Jumlah makanan dan Minuman untuk rapat staf dan tamu	Dos				- Jumlah makanan dan Minuman untuk rapat staf dan tamu	Dos			
		- Alat dan Bahan Kebersihan	Jenis	23			- Alat dan Bahan Kebersihan	Jenis	23		
3 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar	Bakesbangpol	- Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah dan Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kali	67	51.086.760	3 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar	Bakesbangpol	- Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah dan Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kali	67	50.000.000
6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Prosentase sarana dan prasarana apratur dalam keadaan baik	%	100%	370.089.548	6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Prosentase sarana dan prasarana apratur dalam keadaan baik	%	100%	370.089.548
1 Pembangunan/Rehab/Pemeliharaan Gedung Kantor	Bakesbangpol	- Gedung kantor aparatur pemerintah daerah yang	Kegiatan	3	165.789.550	1 Pembangunan/Rehab/Pemeliharaan Gedung Kantor	Bakesbangpol	- Gedung kantor aparatur pemerintah daerah yang	Kegiatan	3	100.000.000

RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Pagu Indikatif	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Pagu Indikatif		
2 Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Bakesbangpol	- Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 yang dipelihara	Kendaraan Roda 4	3	75.000.000	2 Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Bakesbangpol	- Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 yang dipelihara	Kendaraan Roda 4	3	60.000.000
		- Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Kendaraan Roda 2					- Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Kendaraan Roda 2		
3 peralatan dan perlengkapan kantor	Bakesbangpol	- Jumlah spanduk/umbul-umbul/bendera	Jenis	3	129.299.998	3 peralatan dan perlengkapan kantor	Bakesbangpol	- Jumlah spanduk/umbul-umbul/bendera	Jenis	3	100.000.000
		- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan & Perlengkapan Kantor	Jenis	9				- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan & Perlengkapan Kantor	Jenis	9	
		- Jumlah Meubelair yang terpelihara secara rutin/berkala	Jenis	3				- Jumlah Meubelair yang terpelihara secara rutin/berkala	Jenis	3	
		- Jumlah Pengadaan Komputer	Unit	1				- Jumlah Pengadaan Komputer	Unit	1	
		- Jumlah Pengadaan Pengadaan Meubelair	Buah	1				- Jumlah Pengadaan Pengadaan Meubelair	Buah	1	
		- Jumlah Pengadaan alat rumah tangga lainnya (home use) / Karpet	Meter / Jenis	2				- Jumlah Pengadaan alat rumah tangga lainnya (home use) / Karpet	Meter / Jenis	2	
7 Program Peningkatan kapasitas		Prosentase aparatur yang	%	100%	17.250.000	7 Program Peningkatan kapasitas		Prosentase aparatur yang mengikuti	%	100%	15.000.000
1 Pelaksanaan Bimtek / Sosial / Seminar	Bakesbangpol	- Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek	PNS	4	17.250.000	1 Pelaksanaan Bimtek / Sosial / Seminar	Bakesbangpol	- Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek	PNS	4	15.000.000
8 Program Peningkatan Sistem		Prosentase Pemenuhan Dokumen	%	100%	42.465.000	8 Program Peningkatan Sistem		Prosentase Pemenuhan Dokumen	%	100%	42.465.000
1 Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Bakesbangpol	- Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	13.785.000	1 Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Bakesbangpol	- Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	13.785.000
		- Laporan Keuangan Semesteran	Laporan	1				- Laporan Keuangan Semesteran	Laporan	1	
		- Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan	1				- Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan	1	
2 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Bakesbangpol	- Renja, RKA-SKPD dan DPA-SKPD	Laporan	3	13.680.000	2 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Bakesbangpol	- Renja, RKA-SKPD dan DPA-SKPD	Laporan	3	13.680.000
3 Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	Bakesbangpol	- Jumlah Promosi Pelayanan Perangkat Daerah	Paket	2	15.000.000	3 Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	Bakesbangpol	- Jumlah Promosi Pelayanan Perangkat Daerah	Paket	2	15.000.000

Hasil analisa menunjukkan bahwa semuaprogram dan kegiatan yang dijabarkan di Rancangan Awal RKPD 2021 sudah sesuai kebutuhan Program dan Kegiatan Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang Tahun 2021.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi maupun perguruan tinggi. Berdasarkan hasil telaahan data dan informasi informasi dari penelitian lapangan serta pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten Sampang. Uraian dari kajian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Sampang Tahun 2021

Perangkat Daerah: Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			NIHIL		

Usulan Program dan Kegiatan yang diusulkan Bappelitbangda pada dasarnya adalah sebagai implementasi dan menunjang pada perencanaan pembangunan secara umum, sehingga pada bab ini usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan Kabupaten Sampang adalah nihil.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, tentunya harus memperhatikan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi. Hal ini ditujukan demi tercapainya sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan nasional Tahun 2020 tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 dengan Tema “Peningkatan kontribusi sektor unggulan yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur ekonomi yang memadai menuju Sampang Hebat Bermartabat”.

Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang sebagai unsur penunjang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan dituntut untuk dapat menterjemahkan dan mensinergikan prioritas pembangunan antara provinsi dan daerah. Adapun sinkronisasi prioritas pembangunan daerah, provinsi dan pusat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi, dan
Kabupaten Sampang Tahun 2021

NO.	NASIONAL	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG
1	Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan	Pembangunan manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta pengentasan kemiskinan	Prioritas 1: Peningkatan kualitas pembangunan pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana dasar masyarakat dan pengentasan kemiskinan Prioritas 4: Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional
2	Infrastruktur dan pemerataan wilayah	Pemerataan pembangunan dan penguatan konektivitas serta manajemen kebencanaan	Prioritas 3: Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan hidup dan penanganan bencana
3	Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup	Peningkatan ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya air, energi dan pelestarian lingkungan hidup	
4	Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja	Peningkatan ekonomi kerakyatan melalui nilai tambah ekonomi dan pariwisata, kualitas ketenaga kerjaan serta perluasan kesempatan kerja	Prioritas 2: Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sektor pariwisata, agribisnis serta ekonomi kreatif didukung oleh iklim investasi yang sehat
5	Stabilitas pertahanan dan keamanan	Peningkatan ketentraman dan ketertiban	Prioritas 5: Peningkatan harmonisasi kehidupan masyarakat

Sumber : RKP Kabupaten Sampang Tahun 2021

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran Renja Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang Tahun 2020 haruslah konsisten dan selaras dengan Tujuan dan Sasaran Bakesbang dan Politik yang telah dituangkan dalam Renstra Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Bakesbang dan Politik pada Tahun 2020 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang Tahun 2021

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2020
	Tujuan:		
	Meningkatnya penyelesaian konflik sosial politik	Persentase penyelesaian konflik sosial politik	100,00
	Sasaran:		
1	Persentase penyelesaian konflik sosial politik	1 Persentase penurunan potensi konflik	100,00

3.3 Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang Tahun 2020

Dalam merumuskan program kegiatan Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang mempertimbangkan beberapa faktor penting. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan salah satunya yaitu pencapaian visi dan misi kepala daerah. Merujuk pada RPJMD Kabupaten Sampang, Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang mendukung pada pencapaian **misi 5** yaitu “ **Mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu** ”. Program aksi yang tertuang dalam RPJMD terkait dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda yaitu Optimalisasi transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah. Program aksi tersebut kelak akan dijabarkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Sebagaimana telah tertuang dalam Renstra Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang mendukung pada pencapaian misi 5 RPJMD Kabupaten Sampang serta mendukung pada pencapaian sasaran “ **Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik**”.

Adapun program-program yang mendukung pada sasaran tersebut, yaitu:

- Program Peningkatan Kewaspadaan Dini
- Program Pemantapan dan Pengadaan Kelembagaan Demokrasi
- Program Pengembangan Etika dan Budaya Politik
- Program Integrasi Bangsa
- Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik

Program-program diatas kemudian dikompilasikan dengan hasil analisa kebutuhan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya sehingga perumusan rencana program dan kegiatan Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang Tahun 2021.

C. Rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan sebagai berikut:

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Kabupaten Sampang**

BAKESBANG DAN POLITIK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Sumber Dana APBD		Target Capaian	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.05.	FUNGSI PENUNJANG LAINNYA				3.000.465.000			3.000.465.000
4.05.4.05.06.01.	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Prosentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi dan Jasa Perkantoran		100%	350.000.000		100%	341.998.225
4.05.4.05.06.01.01.	Pelayanan administrasi dan jasa perkantoran		Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang		200.000.000			160.432.400
		Jumlah makanan dan Minuman untuk rapat staf dan tamu		660 Dos			660 Dos	
		Jumlah pembayaran Rekening Langganan Telepon, Air dan Listrik		3 Unit			3 Unit	
		Jumlah Surat Terkirim		1200 Surat	-		1200 Surat	-
		Perpanjangan ijin STNK Roda 2		31 Unit	-		31 Unit	-
		Perpanjangan ijin STNK Roda 4		3 Unit	-		3 Unit	-
4.05.4.05.06.01.02.	Penyediaan sarana administrasi perkantoran	Jumlah Komponen Instalasi listrik / Penerangan Bangunan kantor	Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang	7 Jenis	100.000.000		7 Jenis	130.479.065
		Alat dan Bahan Kebersihan		23 Jenis	-		23 Jenis	-
		Jumlah alat Tulis kantor		34 Jenis	-		34 Jenis	-
		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan		10 Jenis			10 Jenis	
				2 Jenis			2 Jenis	
4.05.4.05.06.01.03.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang	78 Kali	50.000.000		78 Kali	51.086.760
		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Sampang	20 Kali	-		20 Kali	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Sumber Dana APBD		Target Capaian	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.05.4.05.06.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana apratur dalam keadaan baik		100%	260.000.000		100%	356.648.495
4.05.4.05.06.02.01.	Pembangunan/rehab/pemeliharaan gedung kantor	Gedung kantor aparatur pemerintah daerah yang terpelihara secara rutin	Bakesbang dan Politik Kabupaten	3 Kegiatan	100.000.000		3 Kegiatan	140.789.550
4.05.4.05.06.02.03.	Pengadaan/pemeliharaan kendaraan dinas opearsional	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 yang dipelihara	Sampang Bakesbang dan Politik Kabupaten	3 Unit	60.000.000		3 Unit	80.000.000
		Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas /	Sampang	2 Unit	-		2 Unit	-
4.05.4.05.06.02.04.	Pengadaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan & Perlengkapan Kantor	Bakesbang dan Politik Kabupaten	9 Jenis	100.000.000		9 Jenis	135.858.945
		Jumlah Meubelair yang terpelihara	Sampang	3 Jenis	-		3 Jenis	-
		secara rutin/berkala Jumlah spanduk/umbul-umbul/bendera		3 Jenis			3 Jenis	
4.05.4.05.06.03.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur		100%	15.000.000		100%	17.250.000
4.05.4.05.06.03.01.	Pelaksanaan bimtek/sosialisasi/seminar	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek	Bakesbang dan Politik Kabupaten	4 ASN	15.000.000		4 ASN	17.250.000
			Sampang					
4.05.4.05.06.04.	Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik	Prosentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik		100%	42.485.006		100%	42.465.009
4.05.4.05.06.04.01.	Penyusunan laporan kinerja dan keuangan	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bakesbang dan Politik Kabupaten	1 Laporan	13.785.000		1 Laporan	13.785.000
		1 aporan Keuangan Akhir Tahun	Sampang	1 Laporan			1 Laporan	
		1 aporan Keuangan Semesteran		1 Laporan			1 Laporan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Sumber Dana APBD		Target Capaian	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.05.4.05.06.04.02.	Penyusunan dokumen perencanaan dan	Renja, RKA-SKPD dan DPA-SKPD	Bakesbang dan Politik Kabupaten	3 Laporan	13.700.000		3 Laporan	13.680.000
4.05.4.05.06.04.03.	penganggaran Peningkatan pelayanan informasi publik	Jumlah Promosi Pelayanan Perangkat Daerah	Sampang Bakesbang dan Politik Kabupaten	2 Paket	15.000.000		2 Paket	15.000.000
			Sampang					
4.05.4.05.06.32.	Program Peningkatan Kewaspadaan Dini	Persentase penurunan kejadian terkait konflik sosial		100%	1.043.000.000		100%	1.185.229.300
4.05.4.05.06.32.01.	Cegah dini permasalahan sosial	Jumlah Peserta Sosialisasi BNK	Bakesbang dan Politik Kabupaten	1400 Peserta	643.000.000		1400 Peserta	785.229.300
		Jumlah Peserta Kaderisasi	Sampang	300 Orang			300 Orang	
		Jumlah Rakor TIM RNK		12 Kali			12 Kali	
		Jumlah Rakor Tim Kewaspadaan Dini		12 Kali			12 Kali	
4.05.4.05.06.32.02.	Deteksi dini permasalahan sosial	Jumlah Rakor TIM FKDM	Bakesbang dan Politik Kabupaten	12 Kali	400.000.000		12 Kali	400.000.000
			Sampang					
4.05.4.05.06.33.	Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi	Prosentase Lembaga Demokrasi yang dilegalisasi		100 %;	450.000.000		100 %;	848.618.500
4.05.4.05.06.33.01.	Pemberdayaan dan peningkatan kinerja parpol,	Jumlah Peserta sosialisasi dan pembinaan serta pemberdayaan	Bakesbang dan Politik Kabupaten	600 Peserta	250.000.000		600 Peserta	322.205.000
4.05.4.05.06.33.02.	keormasan dan LSM Optimalisasi pemantauan dan perkembangan politik	Bantuan Keuangan Partai Politik	Sampang Bakesbang dan Politik Kabupaten	11 Parpol	200.000.000		11 Parpol	526.413.500
	Pileg & Pilpres	Jumlah Diskusi Politik	Sampang	2 Kali			2 Kali	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)			Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Sumber Dana APBD		Target Capaian	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.05.4.05.06.3 4.	Program Pengembangan Etika dan Budaya Politik	Persentase masyarakat yang mendapatkan pemahaman etika dan budaya politik		0,09%	190.000.000		0,09%	256.428.233
4.05.4.05.06.3 4.01.	Pemantapan dan pengembangan etika politik	Jumlah masy. yang mengikuti kegiatan Pemantapan Etika Politik	Bakesbang dan Politik Kabupaten	186 Peserta	150.000.000		186 Peserta	195.996.840
4.05.4.05.06.3 4.02.	Koordinasi penegakan HAM	Jumlah Rakor Tim & Laporan RAN HAM	Sampang Bakesbang dan Politik Kabupaten	8 Kali	40.000.000		8 Kali	60.431.393
			Sampang					
4.05.4.05.06.3 5.	Program Integrasi Kebangsaan	Jumlah Kelompok yang mendapatkan peningkatan Wawasan Kebangsaan		2 Kelompok	650.000.000		2 Kelompok	951.500.000
4.05.4.05.06.3 5.01.	Pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan	Bakesbang dan Politik Kabupaten	200 Peserta	300.000.000		200 Peserta	470.474.000
4.05.4.05.06.3 5.02.	Pemantapan pembauran kebangsaan	Jumlah Fasilitasi Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Sampang Bakesbang dan Politik Kabupaten	12 Kali	350.000.000		12 Kali	481.026.000
		Kab/Kota Jumlah Rakor Tim FKUB	Sampang	12 Kali			12 Kali	
	TOTAL				3.000.485.006			4.000.137.762

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang mengampu urusan Unsur Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Program - program Bakesbang dan Politik pada Tahun 2021 mendukung prioritas pembangunan “Prioritas 5. *“Peningkatan harmonisasi kehidupan masyarakat”* sebagaimana tertuang pada RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021. Adapun Rencana Kerjadan Pendanaan Bakesbang dan Politik dapat dilihat pada table berikut ini:

**Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Bakesbangpol Tahun 2021**

KODE REKENING	Urusan Bidang Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5
	Belanja Tidak Langsung (BTL)	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN Bakesbangpol		2.556.000.451
	Belanja Langsung			
4 .05 .06 .01	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Prosentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi dan Jasa Perkantoran		
4. 05 06 01. 01	Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	- Jumlah Surat Terkirim - Jumlah pembayaran Rekening Langganan Telepon, Air dan Listrik - Perpanjangan ijin STNK - Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan - Jumlah makanan dan Minuman untuk rapat staf dan tamu	1200 lbr 3 Unit 31 Roda 2 dan 3 Roda 4 2 Jenis 516 dos untuk rapat dan 144 untuk tamu	96.832.400
4. 05 06 01. 02	Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	- Jumlah alat Tulis kantor - Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan - Jumlah Komponen Instalasi listrik / Penerangan Bangunan kantor - Alat dan Bahan Kebersihan	34 Jenis 10 Jenis dan 30000 lembar 7 Jenis 23 Jenis	128.479.065
4. 05 06 01. 03	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	- Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah - Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	67 kali	48.107.000
4 .05 .06 .02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana apratur dalam keadaan baik		
4. 05 06 02. 01	Pembangunan/Rehab/Pemeliharaan Gedung Kantor	- Gedung kantor aparratur pemerintah daerah yang terpelihara secara rutin	3 Kegiatan	88.874.750
4. 05 06 02. 03	Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 yang dipelihara - Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	3 Kendaraan Roda 4 1 Kendaraan Roda 2	69.430.000
4. 05 06 02. 04	Pengadaan / Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Jumlah spanduk/umbul-umbul/bendera - Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan & Perlengkapan Kantor - Jumlah Meubelai yang terpelihara secara rutin/berkala - Jumlah Pengadaan Komputer - Jumlah Pengadaan Pengadaan Meubelair - Jumlah Pengadaan Alat Pendinginan - Jumlah Pengadaan alat rumah tangga lainnya (home use) / Karpet - Jumlah Pengadaan Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	3 Jenis 9 Jenis 3 Jenis 1 unit 1 buah 2 unit 12 meter 1 unit	141.800.000
4 .05 .06 .03	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur		
4. 05 06 03. 01	Pelaksanaan BinteK / Sosial / Seminar	- Jumlah Pegawai yang mengikuti BinteK	4 PNS	17.250.000

1	2	3	4	5
4 05 06 04	Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik	Prosentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik		
4. 05 06 04. 01	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	- Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Laporan Keuangan Semesteran - Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	13.445.000
4. 05 06 04. 02	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	- Renja, RKA-SKPD dan DPA-SKPD	3 Laporan	13.160.000
4. 05 06 04. 03	Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	- Jumlah Promosi Pelayanan Perangkat Daerah	2 Paket	15.000.000
4 05 06 32	Program Peningkatan Kewaspadaan Dini	Persentase penurunan kejadian terkait konflik sosial		931.287.000
4. 05 06 .32 01	1 Cegah Dini Permasalahan Sosial	- Jumlah Peserta Sosialisasi BNK - Jumlah Rakor TIM BNK - Pengkaderan P4GN - Jumlah Rakor Tim Kewaspadaan Dini	1400 Peserta 12 Kali 300 orang 12 Kali	767.341.000
4. 05 06 .32 02	2 Deteksi Dini Permasalahan Sosial	- Jumlah Rakor TIM FKDM	12 bulan	163.946.000
4 05 06 33	Program Pematapan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi	dilegalisasi		365.673.000
4. 05 06 33. 01	Pemberdayaan dan Peningkatan Kinerja Parpol, Keormasan dan LSM	- Jumlah Peserta sosialisasi dan pembinaan serta pemberdayaan	300 Peserta	199.290.000
4. 05 06 33. 02	Optimalisasi Pemantauan dan Perkembangan Politik Pileg dan Pilpres	- Bantuan Keuangan Partai Politik - Jumlah Diskusi Politik	11 Parpol 2 Kali	166.383.000
4 05 06 34	Program Pematapan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi	Persentase masyarakat yang mendapatkan pemahaman etika dan budaya politik		211.597.000
4. 05 06 34. 01	Pematapan dan Pembagian Etika Politik	- Jumlah masy. yang mengikuti kegiatan Pematapan Etika Politik	186 Peserta	169.004.000
4. 05 06 34. 02	Koordinasi Penegakan HAM	- Jumlah Rakor Tim & Laporan RAN HAM	8 kali	42.593.000
4 05 06 35	Program Integrasi Kebangsaan	Jumlah Kelompok yang mendapatkan peningkatan Wawasan Kebangsaan		532.747.000
4. 05 06 35. 01	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	- Jumlah Peserta yang Mengikuti Pematapan Nilai-Nilai Kebangsaan	200 Peserta sosialisasi	228.315.000
4. 05 06 35. 02	Pemantapan Pembauran Kebangsaan	- Jumlah Rakor Tim FKUB - Jumlah Fasilitasi Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kab/Kota	6 Bulan 6 Bulan	304.432.000
				5.229.682.666

Pada Tahun 2021 Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang akan melaksanakan Urusan Unsur Penunjang lainnya dengan total anggaran Rp. 5.556.445.451,00 yang terdiri dari **Belanja Tidak Langsung** sebesar Rp2.556.000.451,00 dan **Belanja Langsung** sebesar Rp 3.000.465.000,00 Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung dan melaksanakan **1 urusan, 8 program dan 18 kegiatan**. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yaitu di Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampa

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang disusun sejalan dengan Tema RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021 yaitu **“Peningkatan kontribusi sektor unggulan yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur ekonomi yang memadai menuju Sampang Hebat Bermartabat”**, dan penjabaran dari tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang yang tertuang dalam Renstra yaitu **“Meningkatnya penyelesaian konflik sosial politik”**. Hasil evaluasi atas Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang tahun 2019 menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja program/kegiatan adalah 78,80 % atau dapat dikategorikan baik.

Tujuan dan sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 haruslah konsisten dan selaras dengan Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah dituangkan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Adapun tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang adalah **“Meningkatkan penyelesaian konflik sosial politik”** yang didukung oleh dua sasaran yaitu: **Meningkatnya pencegahan dan penanganan potensi konflik sosial.**

Pada tahun 2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan melaksanakan Urusan Pemerintahan fungsi penunjang lainnya dengan total anggaran Rp. 5.556.445.451,00 yang terdiri dari **Belanja Tidak Langsung** sebesar Rp2.556.000.451,00 dan **Belanja Langsung** sebesar Rp 3.000.465.000,00 Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung dan melaksanakan **1 urusan, 8 Program dan 18 kegiatan**. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yaitu di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan lingkup Kabupaten Sampang.

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka pelaksanaan renja tahun 2021, maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaan dan tindak lanjut supaya program dan kegiatan yang telah di rencanakan sesuai dengan harapan pembangunan. Adapun beberapa kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut adalah sebagai berikut:

1. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang haruslah berpedoman kepada RKPD dan disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional dan propinsi supaya perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan selaras dan bersinergi;
2. Dokumen Renja ini kemudian menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020;
3. Dokumen Renja ini digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat tahunan.

BUPATI SAMPANG,

H. SLAMET JUNAI DI